

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Mario Valentino Hutabarat*
Dr. H. Tajuddin Noor, SH, M, Hum, SpN**
Dr. Cut Mutia, SH. M.H***

ABSTRAK

Dalam ruang lingkup keamanan komputer, phising adalah salah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan. Dimana proses phising ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti username, password dan detil kartu kredit dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya atau *legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. Phising ini juga biasanya ditujukan kepada pengguna online banking, karena menggunakan isian data (ID) pengguna dan kata sandi, dan tidak menutup kemungkinan untuk ditujukan ke pengguna online lainnya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* berbentuk phising, pembuktian terjadinya tindak pidana phising serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana phising.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur Peraturan-peraturan dan perundang-undangan serta kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* berbentuk phising, bahwa peraturan perundang-undangan mengenai phising masih belum ada, namun pelaku tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk phising dapat dijerat dalam KUHP serta UU ITE dan perubahannya, Pembuktian terjadinya tindak pidana phising melalui media online adalah mutlak perlu karena semua berlangsungnya tindak pidana tersebut dilakukan dengan bantuan elektronik seperti rekaman data email yang dikirimkan terdakwa, Riwayat chatting antara korban dan pelaku tindak phising serta bukti struk ATM, SMS, verifikasi pemesanan barang dan lain-lain rekam data penipuan harus dijamin keutuhannya atau keasliannya untuk diajukan sebagai alat bukti serta Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana phising diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 38 UU ITE serta diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Phising

***Mahasiswa Magister Hukum UISU**

****Dosen Pembimbing Pertama Magister Hukum UISU**

*****Dosen Pembimbing Kedua Magister Hukum UISU**

**LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF PHISHING CRIMES
ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS**

Mario Valentino Hutabarat *
Dr. H. Tajuddin Noor, SH. M.Hum . SpN **
Dr. Cut Mutia, SH. MH ***

ABSTRACT

In The scope of computer security, phishing is an electronic crime in the form of fraud. This phishing process aims to capture very sensitive information such as usernames, passwords and credit card details in the form of impersonating a trustworthy entity or legitimate organization and usually communicating electronically. This phishing is also usually aimed at online banking users, because it uses user data (ID) and password input, and does not rule out the possibility of being aimed at other online users.

The aim of the research is to determine the punishment for perpetrators of *cybercrime* in the form of phishing, proof of the occurrence of phishing crimes and legal protection for victims of phishing crimes.

The Data used in this research is secondary data. Secondary data is data obtained from literature on regulations and legislations as well as cases related to the problem.

The results of the research show that punishment for perpetrators of *cybercrime* in the form of phishing, that there are still no legal regulations regarding phishing, but perpetrators of *cybercrime* in the form of phishing can be charged under the Criminal Code and the ITE Law and its Amendments, Proving the occurrence of phishing crimes through the media online is absolutely necessary because all criminal acts are carried out with electronic assistance such as recording email data sent by the defendant, chat history between the victim and the perpetrator of the phishing act as well as proof of ATM receipts, SMS, verification of goods orders and other fraud data records must be guaranteed to be intact, or its authenticity to be submitted as evidence and legal protection for victims of phishing crimes is regulated in Article 378 of The Criminal Code, Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law, Article 38 of the ITE Law and regulated in Article 40 of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications.

Keywords : Legal Protection, Victims, Phishing Crime

***Mahasiswa Magister Hukum UISU**

**** Dosen Pembimbing Pertama Magister Hukum UISU**

***** Dosen Pembimbing Kedua Magister Hukum UISU**